

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT**



**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
NOMOR: KEP/303/IX/2024, TANGGAL 3 SEPTEMBER 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan lingkungan strategi Kalbar	4
b. Analisis	34
2. Identifikasi Masalah	41
II. Tujuan dan Sasaran	43
1. Visi dan Misi Polri	43
a. visi Polri	43
b. misi Polri	43
2. Visi dan Misi Polda Kalbar	43
a. visi Polda Kalbar	43
b. misi Polda Kalbar	43
3. Tujuan Jangka Menengah	44
a. Nasional	43
b. Tujuan Jangka Menengah Polri	44
c. Tujuan Jangka Mengah Polda Kalbar	44
4. Sasaran Prioritas	44
a. Nasional	44
b. Sasaran Prioritas Polri T.A. 2025	45
c. Sasaran Prioritas Polda Kalbar T.A. 2025	46
III. Program Perioritas Nasional dan Arah Bijak Polri Tahun 2025	47
1. Program Prioritas Nasional	47
2. Program Kebijakan dan Strategi Polri T.A. 2025	47
3. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar T.A. 2025	78
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025	103
1. Program dan Kegiatan	103
2. Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025	107
V. P e n u t u p	110

LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLDA KALBAR T.A. 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Nomor : Kep/303/IX/2025

Tentang

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/778/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1008/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/285/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Rencana Strategi Polda Kalbar Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2025 (REVISI)

1. rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing satuan;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal: 5

September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
PIPI RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

Distribusi B dan C Polda Kalbar.

**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT T.A. 2025
REVISI**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang semakin pesat, demikian juga dinamika tantangan yang dihadapi Polri. Saat ini kita memasuki era Society 5.0 yang juga dikenal dengan '*super-smart society*' dimana kehidupan manusia dipermudah dengan adanya teknologi dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Muncul banyak jenis kejahatan baru yang dahulu tidak dikenal, dan ini menuntut Polri untuk berinovasi dan siap menangani kejahatan tersebut.

Dinamika tantangan ini tidak terlepas dari pengaruh global, terutama dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebaran informasi yang sudah tidak mengenal batas negara, kemajuan sarana transportasi, persaingan bebas di sektor ekonomi, serta pergeseran tata nilai sosial budaya dan/atau pola komunikasi masyarakat. Adanya tuntutan dari masyarakat tentang hak demokrasi, perlindungan atas hak asasi manusia, terwujudnya rasa keadilan, serta kecepatan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, maupun penegakan hukum yang berkeadilan, terus disuarakan dari waktu ke waktu. Di samping itu, pasca pandemi Covid-19 yang masih memerlukan penanganan serius, pemerintah perlu terus waspada terhadap situasi ketidakpastian global mulai dari krisis energi hingga keuangan, serta ancaman kejahatan berbasis teknologi baru.

Salah satu dampak dari dinamika tantangan yang terkait dengan tugas pokok Polri adalah perkembangan modus operandi dari setiap bentuk gangguan kamtibmas, baik yang bersifat konvensional (penganiayaan, pembunuhan, pencurian, penipuan, penggelapan, dan sebagainya), transnasional (terorisme, narkoba, kejahatan dunia maya, penambangan.....

penambangan/penebangan/penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia), kejahatan yang merugikan kekayaan negara (korupsi, pencucian uang, gratifikasi, dan sebagainya), maupun kejahatan yang berpotensi memunculkan kontinjensi sosial (kekerasan sosial berlatar belakang SARA, tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok marjinal, keributan antar kelompok masa, dan sebagainya). Kemajuan teknologi dan informasi juga memunculkan bentuk kejahatan baru dengan modus yang lebih canggih, seperti kejahatan siber, transaksi keuangan ilegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Bahkan para teroris dan kelompok ekstrim telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya.

Guna menghadapi tantangan dan perkembangan era digital yang semakin kompleks, perlu smart policing yang dimaknai sebagai pelaksanaan tugas-tugas kepolisian secara lebih inovatif, menerapkan sains dan teknologi serta *evidence-based* (berbasis bukti), dan menggunakan pendekatan antar disiplin. Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan dengan terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sebagai aparat yang berkewajiban melindungi, melayani dan menegakkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri perlu terus memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarana.

Pada Rencana Kerja Polri T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rancangan *Grand Strategy* Polri dan Rancangan Rencana Strategis Polri 2025-2029. Rencana Kerja Polri T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) pilar Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme; (2) pilar Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai "*Safe Guarding*" penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama dari masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari road map Visi Indonesia 2025-2045.

pada.....

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 pemerintah mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dikarenakan tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sedangkan kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2025 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang Polri.

Polda Kalbar sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya di Provinsi Kalbar harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di Provinsi Kalbar demi terselenggaranya Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polda Kalbar tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polda Kalbar dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polda Kalbar dari pemerintah/swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polda Kalbar dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polda Kalbar diharapkan dapat membuat Polda Kalbar semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polda Kalbar untuk senantiasa terus-menerus secara

berkelanjutan.....

berkelanjutan meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah:

- a. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
- b. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
- c. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
- d. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Mengacu pada Rencana Kerja Polri T.A. 2025, Polda Kalbar telah menyusun Rencana Kerja Polda Kalbar T.A 2025, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Kerja Polri T.A. 2025. Selain itu penyusunan Renja dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional SEBAGAI Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Polda Kalbar T.A. 2025 memuat arah kebijakan dan strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan Rancangan Renja Polda Kalbar Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi perkembangan lingkungan strategis meliputi aspek kehidupan masyarakat di daerah Kalimantan Barat yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam).

Selanjutnya.....

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polda Kalbar yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Lingkungan Strategi Kalbar

1) geografi

Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2⁰08' LU serta 3⁰02' LS serta di antara 108⁰30' BT dan 114⁰10' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0⁰) tepatnya di atas Kota Pontianak. Pengaruh letak geografis ini, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 Km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

Tabel 1.1 Batas-batas wilayah daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Utara North	Timur East	Selatan South	Barat West
Kabupaten Sambas	Laut Natuna & Sarawak (Malaysia)	Sarawak (Malaysia) & Bengkayang	Singkawang & Bengkayang	Laut Natuna

Kabupaten.....

6 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/303/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

Kabupaten Bengkayang	Sambas	Sanggau & Serawak (Malaysia)	Landak & Kab. Mempawah	Laut Natuna & Singkawang
Kabupaten Landak	Bengkayang	Sanggau	Kab. Mempawah & Kubu Raya	Kab. Mempawah
Kabupaten Mempawah	Bengkayang	Kubu Raya & Landak	Kota Pontianak & Kubu Raya	Laut Natuna
Kabupaten Sanggau	Serawak (Malaysia)	Sekadau	Ketapang	Landak
Kabupaten Ketapang	Sanggau & Sekadau	Melawi & Kalimantan Tengah	Laut Jawa	Kayong Utara, Kubu Raya & Selat Karimata
Kabupaten Sintang	Serawak (Malaysia) & Kapuas Hulu	Kapuas Hulu & Kalimantan Tengah	Melawi & Kalimantan Tengah	Sekadau & Sanggau
Kabupaten Kapuas Hulu	Serawak (Malaysia)	Kalimantan Timur	Sintang	Sintang
Kabupaten Sekadau	Sintang	Sintang	Ketapang	Sanggau
Kabupaten Melawi	Sintang	Kalimantan Tengah	Ketapang	Kabupaten Melawi
Kabupaten Kayong Utara	Ketapang, KubuKetapang Raya & Laut Natuna	Ketapang & Selat Karimata	Laut Natuna	Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Kubu Raya	Landak, Kab. Sanggau & Mempawah & Kota Ketapang Pontianak	Kayong Utara	Laut Natuna	Kabupaten Kubu Raya
Kota Pontianak	Kab. MempawahKubu Raya	Kubu Raya	Kubu Raya	Kota Pontianak
Kota Singkawang	Sambas Bengkayang	Bengkayang	Laut Natuna	Kota Singkawang
Kalimantan Barat	Serawak / Malaysia Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah dan Laut Jawa	Laut Natuna dan Selat Karimata

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024

Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak) sepanjang ± 966 Km yang membentang dari Kabupaten Sambas sampai dengan batas Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari darat, rawa-rawa, perbukitan dan sungai dengan luas: 24.206,50 Km² terdiri dari 15 Kecamatan dan 99 desa. Terdapat 67 jalan illegal yang mudah dijangkau menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Serawak.

Wilayah Kalimantan merupakan wilayah terbuka baik dari wilayah antar Kalimantan, wilayah lainnya di Indonesia dan dari wilayah.....

wilayah Negara Malaysia Timur, sehingga kondisi ini akan menjadi tantangan terhadap berbagai tindak kejahatan baik yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.

Provinsi Kalimantan Barat luas wilayah sebesar 147.307 Km² dan terbagi menjadi 14 daerah Kabupaten / Kota yaitu 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yakni : Kabupaten Pontianak dan Kubu Raya, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara, Landak, Bengkayang, Sekadau dan Melawi, serta Kota Pontianak dan kota Singkawang. Kota Pontianak juga merangkap sebagai Ibu Kota Propinsi. Bila ditinjau luasnya menurut wilayah kabupaten dan kota ini luas terbesar adalah :

Tabel 1.2 Batas-batas wilayah daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota Regency/ Municipality	Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality	Luas¹ (km²) Total Area (square.km)
Kabupaten Sambas	Sambas	6 716,52
Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	5 075,48
Kabupaten Landak	Ngabang	8 915,10
Kabupaten Mempawah	Mempawah	2 797,88
Kabupaten Sanggau	Sanggau	12 857,80
Kabupaten Ketapang	Ketapang	31 240,74
Kabupaten Sintang	Sintang	21 638,20
Kabupaten Kapuas Hulu	Putussibau	29 842,00
Kabupaten Sekadau	Sekadau	5 444,20
Kabupaten Melawi	Nanga Pinoh	10 640,80
Kabupaten Kayong Utara	Sukadana	4 568,26
Kabupaten Kubu Raya	Sungai Raya	6 953,22
Kota Pontianak	Pontianak	107,80
Kota Singkawang	Singkawang	504,00
Kalimantan Barat	Pontianak	147 307,00

Sumber: Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2024

Perairan laut Kalimantan Barat merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 meliputi Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata, di mana berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar 2020, terdiri dari :

- a. panjang garis pantai : 1.398 Km.
- b. luas pesisir pantai : 2,06 Juta Ha.
- c. luas laut sebesar : 3,2 Juta Ha.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota yang merupakan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP-3-K) yaitu Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Ketapang. Jumlah pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat berjumlah 212 buah terdiri dari 56 berpenghuni dan 156 tidak berpenghuni, yang tersebar di 8 kabupaten/ kota pesisir dan 1 kabupaten pedalaman, yaitu :

- a. Kabupaten Sambas
- b. Kota Singkawang
- c. Kabupaten Bengkayang
- d. Kabupaten Mempawah
- e. Kabupaten Kubu Raya
- f. Kota Pontianak
- g. Kabupaten Kayong Utara
- h. Kabupaten Ketapang, dan
- i. Kabupaten Sanggau.

2) demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk sementara (Interim) 2020 pertengahan tahun berjumlah sekitar 5.623.328 jiwa, di mana 2.887.209 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.736.119 jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 38 Jiwa per Km². Sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kalimantan Barat sebesar 105,52. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat ±106 penduduk laki-laki.

Dalam.....

Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Kalimantan Barat mengalami penambahan sekitar 1,02 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 101,84 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2020-2022), laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat sebesar 1,33 persen per tahun. Tiga kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kabupaten Ketapang, Bengkayang dan Kayong Utara masing-masing tumbuh 2,11; 2,08; 2,03 persen. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu mempunyai pertumbuhan penduduk terkecil di antara kabupaten/kota lainnya.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Penduduk (jiwa) Population (person)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2022	2010-2022	2020-2022
Kabupaten Sambas	629 905	647 844	2,34	1,62
Kabupaten Bengkayang	286 366	296 855	2,80	2,08
Kabupaten Landak	397 610	405 396	1,83	1,11
Kabupaten Mempawah	301 560	310 927	2,48	2,48
Kabupaten Sanggau	484 836	492 989	1,67	1,67
Kabupaten Ketapang	570 657	591 917	2,84	2,84
Kabupaten Sintang	421 306	426 416	1,40	1,40
Kabupaten Kapuas Hulu	252 609	254 995	1,25	1,25
Kabupaten Sekadau	211 559	214 429	1,49	1,49
Kabupaten Melawi	228 270	235 025	2,40	2,40
Kabupaten Kayong Utara	126 571	131 104	2,75	2,75
Kabupaten Kubu Raya	609 392	622 217	1,91	1,91
Kota Pontianak	658 685	669 795	1,68	1,68
Kota Singkawang	235 064	241 467	2,27	2,27
Kalimantan Barat	5. 414. 390	5. 541. 379	2,04	1,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kalbar Menurut Agama Yang Dianut

Kabupaten/ Kota Regency /Municipality	Islam Islam	Protestan Protestant	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Konghuchu Confucianism	Aliran Kepercayaan /Lainnya Other
Kabupaten Sambas	568 466	11 888	18 529	179	38 746	3028	2

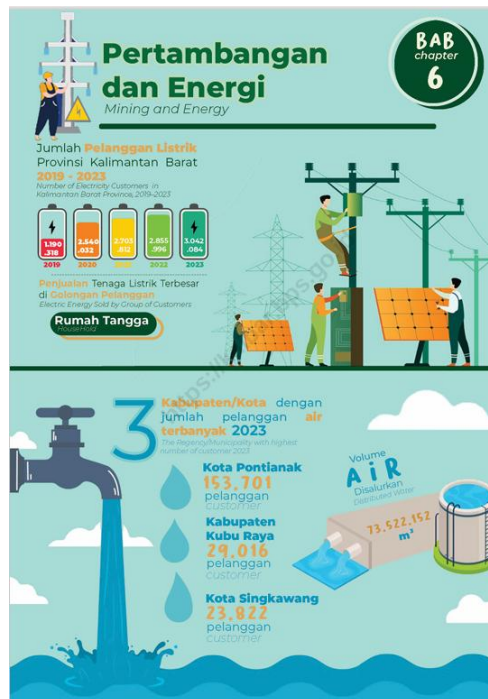
Kabupaten.....

10 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/303/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

Kabupaten Bengkayang	102 782	78 577	90 801	270	15 536	2541	81
Kabupaten Landak	65 431	121 744	215 528	47	2336	233	1
Kabupaten Mempawah	322 288	19 635	23 699	74	31 785	970	320
Kabupaten Sanggau	165 867	83 251	237 933	135	3393	101	125
Kabupaten Ketapang	375 172	45 748	146 671	489	6770	618	349
Kabupaten Sintang	169 321	103 780	157 623	116	2280	491	2
Kabupaten Kapuas Hulu	161 629	22 620	81 714	31	288	367	2
Kabupaten Sekadau	85 335	30 154	100 270	4	1410	267	28
Kabupaten Melawi	111 482	48 974	48 208	39	1010	244	1
Kabupaten Kayong Utara	123 175	1734	953	512	1881	426	3
Kabupaten Kubu Raya	510 247	24 755	35 431	494	42 551	1413	19
Kota Pontianak	518 952	32 657	40 022	316	78 434	3105	5
Kota Singkawang	130 572	13 440	17 891	71	76 344	2005	4
Kalimantan Barat	3 320. 719	638 957	1.215 273	2.777	302 673	15 809	943

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

- 3) sumber daya alam
 - a) Pertambangan dan energi



Data PT. PLN (Persero) Wilayah V menunjukkan terjadinya penurunan daya terpasang pada tahun 2022 yaitu sebesar 111.713 KW dibandingkan dengan kondisi daya terpasang tahun 2023 sebesar 108.023 KW. total produksi listrik yang dihasilkan PLN pada 2023 sebesar 171.720.000 KWh. dibandingkan tahun sebelumnya, produksi listrik di tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 227.825.793 KWh dibandingkan produksi tahun 2022. Pada saat listrik mengalami penurunan produksi, Bahan Bakar Minyak (BBM) justru mengalami.....

mengalami peningkatan dalam hal distribusi. Regulasi pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi (bensin) mengakibatkan peningkatan distribusi khususnya pada bahan bakar pertalite. tercatat di tahun 2023 distribusi pertalite meningkat 4 kali lipat dibanding 2022 yaitu sebesar 697,437 juta liter. Sementara itu distribusi LPG pada 2023 mengalami penurunan pada LPG 5 kg sebanyak 3.897 kg dan 12 kg sebanyak 9.935 kg dan masing-masing turun sebesar 159.315 dan 2.741 kg. Selain listrik, air bersih juga menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. pemanfaatan air bersih secara umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan masak/minum, mandi, dan cuci. Menurut data yang diterima dari PDAM, tercatat pada tahun 2023 jumlah air bersih yang disalurkan sebanyak 73.522.152m³. pendistribusian paling banyak terjadi di Kota Pontianak dengan total air yang disalurkan sebesar 40.341.699m³ Jumlah pelanggan air bersih pada tahun 2023 sebesar 320.106 pelanggan.

Tabel 1.5 Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalbar

Komoditas	Lokasi	Sumber Daya/ Potensi	
Radio aktif			
Uranium	Kabupaten Melawi	24.112,00	Ton
Logam			
Emas	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	37.359.135,00	Kg
Timbal/ Timah Hitam	Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang	444.393	Ton
Besi	Kab. Ketapang ,Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang & Sambas	102.880.224,00	Ton
Mangan	Kab. Bengkayang dan Sambas	2.409.735,00	Ton
Seng	Kabupaten. Ketapang	35.064	Ton
Bauksit	Kab. Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kuburaya & Kayong Utara	4.376.036.722,00	Ton

12 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/303/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

Antimoni	Kabupaten. Kapuas Hulu	149.990,00	Ton
Cinnabar	Kabupaten. Kapuas Hulu	5.306.283,00	Ton
Barit	Kabupaten. Ketapang	1.932,00	Ton
Non Logam			
Mika	Kabupaten. Sanggau dan Sintang	524,00	Ton
Batu Gamping	Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Ketapang	30.000.000,00	Ton
Zirkon	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.570.210.100,00	Ton
Feldspar	Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas	2.333.667,00	Ton
Kaolin	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	316.858.857,00	Ton
Ball Clay	Kabupaten Bengkayang	10.569.307,00	Ton
Pasir Kuarsa	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	629.581.456,75	Ton
Intan	Kabupaten Landak	8.311,25	Karat
Kristal Kuarsa	Kabupaten Ketapang, Landak dan Melawi	810,06	Ton
Batubara			
Batubara	Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	186.662.875	Ton
Gambut	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	12.577.145.000	Ton
Batuan			
Andesit	Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang & Sambas	1.040.989.262.858,59	Ton
Basal	Kabupaten Sanggau, Sambas & Bengkayang	6.448.838.134	Ton
Granit	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.565.404.407.811,21	Ton
Pasir Sungai	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	17.681.122.810,96	Ton
Sirtu	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	110.851.194.260,90	Ton
Minyak dan Gas Bumi			
Minyak dan Gas Bumi	Cekungan Ketungau dan Cekungan Melawi	1.073.700.000	STBM

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024



Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan,

Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

- b) Pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan
(1) Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA), Angka sementara produksi padi di Kalimantan Barat tahun 2023 sebesar 688.413,14 ton. Nilai ini mengalami penurunan 42.812,66 atau 5,85% dibandingkan Angka tetap produksi padi tahun 2022 sebesar 731.225,80 ton. Angka Sementara Luas panen dan produktivitas pada tahun 2023 masing-masing sebesar 223.244,07 hektar. Kabupaten/Kota dengan produksi padi terbanyak adalah Kabupaten Sambas sebanyak 171.366,17 ton, disusul oleh Kabupaten Landak sebanyak 100.295,11 ton dan Kabupaten Ketapang sebanyak 87.088,67 ton.

(2) Holtikultura.....

(2) Holtikultura

Produksi cabai rawit dan cabai besar di Kalimantan Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan masing-masing turun sebanyak 144 ton dan 60 ton dibanding tahun 2022. Total produksi cabai rawit pada tahun 2023 sebesar 3,8 ribu ton. Produksi buah-buahan terbanyak di Kalimantan Barat adalah buah pisang sebanyak 134 ribu ton, diikuti jeruk siam 130 ribu ton dan nenas 88 ribu ton. Produksi jeruk pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 79,24 persen dari 72 ribu ton pada 2022 menjadi 134 ribu ton. penghasil jeruk terbesar dipegang oleh Kabupaten Sambas dengan kontribusi mencapai 79,65 persen dari total produksi jeruk se-Kalimantan Barat.

(3) Perkebunan

Angka Sementara (ASEM) sawit tahun 2023 menunjukkan terjadi peningkatan luas lahan secara total sebanyak 2.119.368 hektar dibandingkan tahun 2022 dengan produksi minyak kelapa sawit diperkirakan sebesar 2.063.840 ton. Beberapa komoditas perkebunan yang mengalami penurunan luas lahan antara lain karet, kopi, dan kakao. Kakao mengalami penurunan luas tanaman mencapai 7.669 hektar pada 2022 menjadi 7.461 hektar di 2023. Dari sisi perkebunan rakyat, hampir semua komoditas mengalami penurunan luas tanaman kecuali pada komoditas kelapa dalam. Penurunan terbesar pada perkebunan rakyat terjadi pada kelapa sawit dengan total luas tanam yang turun mencapai 162 ribu hektar. sementara untuk luas tanaman kelapa dalam mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 78.273 hektar pada 2023.

(4) Kehutanan.....

(4) Kehutanan

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan		
		Suaka Alam dan Pelestarian alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap
1	2	3	4	5
Kabupaten Sambas	26.679,51	30.347,59	11.181,95	
Kabupaten Bengkayang	32.650,23	41.407,50	45.317,76	
Kabupaten Landak	52.744,71	56.216,87	12.241,89	
Kabupaten Mempawah	3.250,60	-	17.117,76	
Kabupaten Sanggau	95.576,10	1.577,86	60.380,12	
Kabupaten Ketapang	292.324,48	169.696,71	624.044,59	
Kabupaten Sintang	451.542,30	69.826,95	604.650,76	
Kabupaten Kapuas Hulu	809.935,48	942.613,10	389.085,07	
Kabupaten Sekadau	64.678,35	-	3.251,20	
Kabupaten Melawi	225.584,48	41.869,94	283.228,58	
Kabupaten Kayong Utara	75.338,16	89.596,15		
Kabupaten Kubu Raya	134.805,61	-	66.574,57	
Kota Pontianak	-	-		-
Kota Singkawang	-	2.479,10		-
Kalimantan Barat	2.265.110,01	1.445.631,77	2.117.074,25	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, 2024

Hutan lindung memiliki luas terbesar dengan total luas 2.265.110,01 hektar, diikuti hutan produksi terbatas dengan luas 2.117.074,25 hektar dan hutan produksi tetap dengan luas 1.445.631,77 hektar. Luas lahan kritis berdasarkan Hasil Review Data Lahan Kritis tahun 2023 adalah sebesar 288.059,17 hektar. Pada tahun 2022, realisasi produksi kayu bulat mengalami peningkatan sebesar 1.709.654 m³.

(5) Peternakan

Kabupaten/ Kota	Sapi Perah		Sapi Potong		Kerbau		Kuda	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kabupaten Sambas	16	16	11.067	7.980	—	—	—	—
Kabupaten Bengkayang	—	—	14.742	6.448	—	—	8	—
Kabupaten Landak	—	—	8.280	7.789	—	—	—	—
Kabupaten Mempawah	—	—	10.732	4.018	—	—	—	—

Kabupaten.....

16 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/303/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

Kabupaten Sanggau	—	—	11.615	11.190	7	7	1	—
Kabupaten Ketapang	—	—	32.230	31.360	1.538	1.678	7	7
Kabupaten Sintang	—	—	6.839	5.512	84	88	—	—
Kabupaten Kapuas Hulu	—	—	6.591	6.112	—	—	—	—
Kabupaten Sekadau	—	—	12.473	9.291	5	5	—	—
Kabupaten Melawi	—	—	12.708	13.506	56	44	—	—
Kabupaten Kayong Utara	—	—	7.017	5.738	3	4	6	6
Kabupaten Kubu Raya	166	185	13.918	9.395	42	52	—	—
Kota Pontianak	4	4	2.392	467	—	—	1	1
Kota Singkawang	—	—	5.974	4.261	2	—	3	1
Kalimantan Barat	186	205	156.578	123.067	1.737	1.878	26	15

Kabupaten/ Kota	Kambing		Domba		Babi	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kabupaten Sambas	22.897	22.784	—	—	6.570	6.317
Kabupaten Bengkayang	21.016	18.352	—	—	41.917	1.289
Kabupaten Landak	7.959	7.538	—	—	109.861	22.954
Kabupaten Mempawah	16.492	2.497	—	—	27.423	765
Kabupaten Sanggau	6.687	6.698	—	—	31.096	3.510
Kabupaten Ketapang	7.155	6.841	—	—	29.678	12.895
Kabupaten Sintang	3.619	3.393	32	34	46.330	5.176
Kabupaten Kapuas Hulu	1.092	1.030	—	—	13.653	5.973
Kabupaten Sekadau	5.310	5.119	41	51	40.792	4.792
Kabupaten Melawi	3.531	3.944	—	—	14.875	3.915
Kabupaten Kayong Utara	16.016	15.174	—	—	2.827	2.455
Kabupaten Kubu Raya	30.822	16.374	83	53	14.614	2.003
Kota Pontianak	1.825	1.807	66	72	1.540	1.386
Kota Singkawang	2.725	2.110	—	—	29.478	2.918
Kalimantan Barat	147.146	113.661	222	210	410.654	76.348

Sumber: Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Data yang disajikan dalam sub bab ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.....

Barat. Pada tahun 2023 populasi pada golongan ternak besar, tercatat sebanyak 158.938 ekor sapi potong, 188 ekor sapi perah, dan 1.490 ekor kerbau (ASEM). Pada golongan ternak kecil, populasi terbesar adalah babi yaitu 232.909 ekor babi, diikuti kambing dengan 147.742 ekor. Kabupaten dengan populasi sapi potong terbanyak adalah Kabupaten ketapang sebanyak 33.036 ekor. pada golongan unggas, Populasi unggas terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 39,83 juta ekor disusul dengan ayam kampung sebanyak 6,20 juta ekor.

(6) Perikanan

Secara geografis, Kalimantan Barat memiliki potensi yang cukup besar di bidang perikanan, baik perikanan laut maupun perairan umum. Nilai produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2023 sebanyak 147.163 ton dengan nilai Rp.4.418.399.223 triliun rupiah. Sedangkan produksi perikanan di perairan daratan sebanyak 33.653 ton dengan nilai Rp.764.288.353 juta rupiah.

4) idiologi

- a) Bergulirnya roda reformasi telah membawa beberapa dampak seperti adanya degradasi terhadap pemahaman dan penghayatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan diperkirakan masih adanya kelompok tertentu yang bertujuan untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lainnya yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis;
- b) Dengan bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut Ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana dan kegiatan dari kerlompok tertentu dalam bentuk untuk mengamalkan ideologi lain seperti faham radikalisme;
- c) Kondisi.....

- c) Kondisi ini sangat membahayakan kedaulatan NKRI bila pemerintah dan instansi terkait tidak melakukan antisipasi secara mendasaar dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk memahami dan menghayati kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d) Berkembangnya kemajuan teknologi berdampak pada penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dengan media internet maupun media sosial yang begitu cepat disaring dengan dasar ideologi dan pemahaman yang kuat akan cepat berdampak terhadap perubahan pemikiran seseorang.
- 5) politik
- a) Lemahnya institusi politik dalam menjalankan fungsi komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik maupun yang berada di tatanan infrastruktur politik akan berdampak pada tingkat partisipasi bangun kepercayaan publik pada kelembagaan politik di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kemampuan dan komitmen partai politik dan lembaga perwakilan politik di daerah untuk membangun komunikasi politik yang lebih intensif dan transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas politik;
 - b) Dalam upaya membangun semangat multikulturalisme dalam politik di daerah, tantangan utama yang masih dihadapi ke depan adalah masih mengentalnya fenomena etnisitas atau primordialisme dalam proses rekrutmen politik di daerah;
 - c) Tantangan terberat secara politik tahun 2025 dalam penataan daerah otonom adalah mengakomodir dan merealisasikan berbagai tuntutan yang muncul di tengah masyarakat akan kebutuhan untuk pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang hingga saat ini belum menunjukkan progres yang dinantikan sehingga akan semakin dituntut untuk segera terealisasikan.
- 6) ekonomi.....

- 6) ekonomi
- d) hingga bulan Juni 2024 tingkat inflasi di Kalbar terus terjaga pada rentang target inflasi nasional. Tingkat inflasi di Kalbar sebesar **2,84%** (*year on year*) dengan tingkat inflasi tertinggi berada di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 3,37% dan tingkat inflasi terendah berada di Kota Singkawang yaitu sebesar 2,09%;
 - e) pada umumnya kebutuhan masyarakat di Kalbar khususnya yang menyangkut kebutuhan sembako masih didatangkan dari luar Kalbar seperti dari Jawa dan Malaysia Timur.
 - f) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Bupati dan Walikota tidak bisa lagi mengeluarkan Ijin usaha Pertambangan, dengan tidak adanya kewenangan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan ijin usaha Pertambangan (IUP) dapat berdampak pada penurunannya PAD di Kabupaten/Kota.
 - g) pada sektor pertambangan, terjadi perubahan peruntukan kawasan HL, HPT, HP, HPK menjadi APL, di dalamnya ada konsesi tambang seluas 231.984,58 hektar. Perubahan ini menimbulkan potensi konflik dengan wilayah kelola masyarakat. Pertambangan di APL juga potensial mengancam kerusakan lingkungan karena akan dilakukan kegiatan pertambangan secara terbuka.
 - h) di bidang pertanian masyarakat masih bercocok tanam secara tradisional terutama di daerah pedalaman dengan membakar hutan dan melakukan perladangan secara berpindah - pindah yang hasilnya belum dapat mencukupi daerah kalbar dan masih mendatangkan dari Pulau Jawa, Thailand/Vietnam;
 - i) melakukan pengawasan yang ketat penggunaan Dana Desa guna menunjang pembangunan di daerah dan mengindari penyimpangan penggunaannya;
- 7) sosial budaya.....

7) sosial budaya

- a) kondisi sosial budaya Kalimantan Barat saat ini pada umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya masa krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum etnis. kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya persatuan dalam keragaman, tumbuhnya suasana kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya;
- b) kehidupan masyarakat Kalbar dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi. Pada sebagian masyarakat, kehidupan beragama belum menggambarkan penghayatan dan penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Mayoritas umat beriman di Kalimantan Barat masih berada pada situasi kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang marginal. Keadaan ini berdampak pada lemahnya ketahanan beragama/kepercayaan, kreativitas umat beriman, dan eksistensi lembaga keagamaan/kepercayaan. Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya kemampuan mereka dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global. Nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan menjadi filter ternyata masih belum berfungsi sebagaimana mestinya.

(1) agama / aliran kepercayaan:

- (a) kehidupan masyarakat Kalbar dalam bidang agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran.....

kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan yang bervariasi;

(b) di Kalbar terdapat 6 agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu : Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu

(2) budaya / Kultur :

Pembangunan Kalbar di bidang budaya relatif mengalami peningkatan. Namun demikian pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur masyarakat Kalbar yang lebih konstruktif, seperti sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai budaya luhur, kearifan lokal, kekeluargaan, solidaritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri, kerja keras dan kreatif-inovatif, masih belum meningkat dan belum berkembang secara merata.

(3) kependudukan / transmigrasi

Kalbar merupakan Provinsi yang banyak menerima warga transmigrasi umum khususnya dari daerah Pulau Jawa dan tersebar di beberapa Kabupaten antara lain : Kab. Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, Ketapang, Kab. Pontianak dan Kab. Bengkayang (Korban gempa, letusan gunung Merapi dan Tsunami dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

(4) kesehatan

pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas status kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan keterjangkauan.....

keterjangkauan layanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, serta kendala ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku obat, ketersediaan obat, perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Perilaku dan pola hidup masyarakat pada umumnya belum peduli terhadap masalah kesehatan, telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit menular, seperti: virus wabah *Covid-19*, demam berdarah (DBD), TBC, flu burung (AI), HIV/ AIDS, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax, stunting dan lain-lain.

(5) kegiatan masyarakat

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan dan timbulnya berbagai masalah pemerintahan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik minat masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum/unjuk rasa di gedung-gedung pemerintahan baik dari masyarakat umum maupun dari mahasiswa.

8) pertahanan dan keamanan

a) kesatuan TNI / POLRI terdiri dari :

No.	Keterangan	Kesatuan	Jumlah
1.	TNI-AD	Kodam	1
		Korem	1
		Kodim	7
		Batalyon	4
		Brigif	1
		Denkav	1
		Armed	1
		Yon Zipur	1

No.	Keterangan	Kesatuan	Jumlah
		Batalyon Kav	1
		Koramil	108
2.	TNI-AL	Lantamal	1
		Lanmarhan	1
3.	TNI-AU	Lanuma	1
		Lanud	1
		Yonko Pashas	1
		Denhanud Paskhas	1
4.	POLRI	Polda	1
		Polresta	1
		Polres	13
		Satbrimob	1
		Dirpolair	1
		SPN	1
		Rumkit Polri	1
		Polsek	153
		Polsek Kawasan	3
		Polsubsektor	9

- b) kekompakan aparat keamanan (TNI / POLRI) cukup baik;
- c) tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI/POLRI relatif kecil;
- d) kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polda Kalbar relatif stabil, hal ini ditandai dalam beberapa tahun terakhir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan SARA dan tindakan pelanggaran hukum yang menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat massif. Sedangkan tindak kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih berpotensi terjadi di Kalimantan Barat.
- e) beberapa kasus menonjol yang mempunyai dampak meresahkan masyarakat dan memerlukan perhatian khusus antara lain :
- (1) tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
 - (2) pembunuhan.
 - (3) penganiayaan berat.
 - (4) pencurian.....

- (4) pencurian dengan pemberatan.
- (5) pencurian dengan kekerasan.
- (6) pencurian ranmor.
- (7) perkosaan.
- (8) pembakaran / kebakaran.
- (9) perjudian.
- (10) narkoba.
- (11) penyelundupan.
- (12) penggelapan.
- (13) pemalsuan mata uang.

f) analisa dan evaluasi data gangguan Kamtibmas tahun 2022 - 2023, yaitu:

NO	JENIS KEJAHATAN	2022			2023		
		L	S	%	L	S	%
1	Konvensional	3104	2654	85.50	4843	2996	61,86
2	Trans Nasional	937	899	95.94	953	732	76,81
3	Terhadap Kekayaan Negara	351	288	82.05	230	193	83,91
4	Kontijensi / Bencana Alam / Kebakaran Hutan	0	0	TETAP	2	3	150
JUMLAH		4.027	4.329	87,45	6.028	3.924	65,10

Secara umum 4 jenis golongan kejahatan periode tahun 2022 banding tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 2001 kasus dari 4.027 kasus menjadi 6.028 kasus atau 49,69%. Kejahatan konvensional mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1.739 kasus dari 3.104 kasus menjadi 4.843 kasus atau 56,02%. Kejahatan transnasional mengalami kenaikan yaitu sebanyak 16 kasus dari 937 kasus menjadi 732 kasus atau 1,71%. Kejahatan kekayaan negara mengalami penurunan yaitu sebanyak 121 kasus dari 351 kasus menjadi 193 kasus atau 34,47 %. Kejahatan kontinjensi mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus dari 0 kasus menjadi 2 kasus atau 100%.

g) perbatasan.....

g) perbatasan

(1) situasi perbatasan

- (a) daerah perbatasan dengan negara Malaysia terletak dibagian utara Kalbar, memanjang dari barat ke timur sepanjang 966 km dengan luas wilayah perbatasan 24.206,50 Km²;
- (b) tidak terdapat pulau terluar namun terdapat pulau kecil berpenghuni dan tidak berpenghuni sebanyak 217 pulau kecil, terdiri dari 56 pulau kecil berpenghuni dan 161 pulau kecil tidak berpenghuni;
- (c) jumlah penduduk kawasan perbatasan (Kab. Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu) Kalimantan Barat sebesar 2.017.877 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk ± 26.5 jiwa/ Km, dengan suku yang heterogen (Dayak, Melayu, Cina dll), agama, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan banyak pendatang sebagai petani, buruh pedagang dan karyawan;
- (d) daerah perbatasan melintasi 5 Kabupaten meliputi (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu) dan 15 Kecamatan serta 98 desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia;
- (e) Polsubsektor perbatasan 5 unit yaitu Polsubsektor Entikong dengan jumlah personel 9 orang, Polsubsektor Segumun dengan jumlah personel 5 orang, Polsubsektor Temajok dengan jumlah personel 6 orang, Polsubsektor Jasa dengan jumlah personel 3 orang dan Polsubsektor Badau dengan jumlah personel 10 orang;

(f) Pos.....

- (f) Pos pelayanan perbatasan 4 unit yaitu Pos pelayanan Aruk di Kec. Sajingan Besar 10 pers, Pos pelayanan Jagoi Babang di Kec. Jagoi Babang 10 pers, Pos pelayanan Nanga Bayan Kec. Ketungau Hulu 10 pers, Pos pelayanan Puring Kencana di Kec. Puring Kencana 10 pers;
 - (g) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah diresmikan yaitu PLBN Entikong di Kab. Sanggau dan PLBN Aruk di Kab. Sambas operasional mulai tanggal 1 Januari 2011 dan PLBN Badau di Kab. Kapuas Hulu yang telah diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012;
 - (h) kasus-kasus yang sering terjadi di wilayah perbatasan antara lain: *Illegal Logging, Illegal Trading, Illegal Fishing, Trafficking In Person*, Keimigrasian, tindak pidana Kepabeanan, Penganiayaan dan Narkoba.
- (2) masalah perbatasan
- Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak) sepanjang ± 966 Km yang membentang dari Kabupaten Sambas sampai dengan batas Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari darat, rawa-rawa, perbukitan dan sungai dengan luas : 24.206,50 Km² terdiri dari 15 Kecamatan dan 99 desa. Terdapat 67 jalan illegal yang mudah dijangkau menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Serawak.
- Daerah perbatasan meliputi :
- (a) Kabupaten Sambas memiliki PPLB resmi, yaitu PPLB Aruk di Sajingan Besar yang mulai dioperasikan pada tanggal 1 Januari 2011. Di Kabupaten Sambas terdapat 9 jalan illegal yang.....

yang mudah dijangkau menghubungkan antara Kab. Sambas dengan Malaysia Timur yaitu :

- Desa Temajuk Kecamatan Paloh dengan Sungai Semunsam Telok Melano Malaysia;
- Dusun Bening Desa Temajuk Kecamatan Paloh menuju Kampung Serabang Telok Melano Malaysia;
- Dusun Usludin Desa Temajuk Kecamatan Paloh dengan Telok Melano Malaysia;
- Dusun Camar Bulan Desa Temajuk Kec. Paloh dengan Semunsam Lundu Malaysia;
- Dusun Aping Km 28 dan 31 Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar dan Pamtas TNI dengan Biawak;
- Dusun Semberuang Km 3 Desa Sebunga dengan Biawak
- Dusun Sajingan Desa Kaliau dengan Aruk;
- Desa Sentaban Kecamatan Sajingan Besar (Kebun PT. KMP);
- Jalur 1 – 3 sekitar Border Dusun Aruk Desa Sebunga Kec. Sajingan Besar dengan Biawak Malaysia.

(b) Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur terdiri dari 2 Kecamatan:

- Kecamatan Jagoi Babang berbatasan dengan Serikin Malaysia Timur;
- Kecamatan Siding;

Kabupaten Bengkayang belum mempunyai PLBN resmi, namun terdapat 11 jalan illegal yang mudah dijangkau menghubungkan antara Kab. Bengkayang dengan Malaysia Timur yang terdapat di:

Jagoi.....

- Jagoi Babang dengan Serikin (Jl. Dwikora Jagoi Babang (Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi) Dengan Serikin, Malaysia);
 - Belakang Pos Terpadu Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi Dengan Serikin, Malaysia;
 - Jagoi Sawit Biji dengan Serikin;
 - Desa Siding dengan Padangpan-Pisang-Kabun;
 - Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Dengan Sebobok, Malaysia;
 - Dusun Sentabeng Desa Sekida Dengan Kampung Rasau, Malaysia;
 - Gunung Besi (PT Ledo Lestari I) Desa Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau, Malaysia;
 - Gunung Besi (PT Ledo Lestari II) Desa Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau, Malaysia;
 - Gunung Besi (PT Ledo Lestari III) Desa Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau, Malaysia;
 - Batu Aum Dusun Siding Desa Siding dengan Kampung Gumbang;
 - Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi (Kebun PT. Biji) dengan Serikin Malaysia.
- (c) Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan Malaysia Timur terdiri dari 2 kecamatan :
- Kecamatan Entikong;
 - Kecamatan Sekayam.
- Kabupaten Sanggau mempunyai 1 PPLB resmi yaitu PPLB Entikong, namun demikian masih terdapat.....

terdapat 14 jalan illegal yang mudah dijangkau menghubungkan antara Kabupaten Sanggau dengan Malaysia Timur, yaitu:

- Entikong dengan Tebedu;
- Dusun Panga Desa Semanget dan Pamtas dengan Kampung Kujang Sain Malaysia;
- Dusun Guntembawang Desa Suruh Tembawang dan Pamtas TNI dengan Sabit Malaysia;
- Pala Pasang dan Pos Pamtas TNI dengan Sadir – Malaysia;
- Dusun Mangkau Desa Pala Pasang Kecamatan Entikong dengan Tepoi;
- Dusun Panga Bintawa Desa Semanget dengan Kujang Saung;
- Peripin dengan Pang Amu;
- Bantan dengan Mapu;
- Lubuk Barat dengan Mongat;
- Segumun dengan Mongkos;
- Tapang Peluntan dengan Lubuk Nibung;
- Sei Tekam dengan Lubuk Nibung;
- Sei Beruang dengan Lubuk Nibung;
- Dusun Guna Banir Desa Sui. Tekam dengan Mongkos.

(d) Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur terdiri dari 2 Kecamatan :

- Kecamatan Ketungau Hulu;
- Kecamatan Ketungau Barat.

Kabupaten Sintang belum mempunyai PPLB resmi, namun terdapat 11 jalan illegal yang mudah dijangkau menghubungkan antara Kab. Sintang dengan Malaysia Timur, yaitu:

Desa.....

- Desa Jasa Kecamatan Ketungan Hulu;
 - Desa Sui Seria dengan Batu Negara;
 - Dusun Sei Enteli dengan Melikin;
 - Dusun Muakan dengan Jl. Aseng;
 - Desa Sui Kelik dengan Pasar Kuari;
 - Desa Nanga Bayan dengan Goa / Ran;
 - Desa Nanga Entoloi dengan Selepong Negara;
 - Desa Semareh dengan Lachao Mungguk;
 - Desa Kelapan dengan Engkramut;
 - Dusun Nanga Gelombang dengan Batu Lintang;
 - Dusun Wanabhakti dengan Batu Lintang.
- (e) Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Malaysia Timur terdiri dari 7 Kecamatan. Dari 7 kecamatan terdapat 19 jalan illegal yang menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Malaysia Timur, yaitu :
- (a) Kecamatan Badau terdapat 6 (enam) jalur ilegal, yaitu:
- Dusun Berangan I Desa Janting dengan Lobok Antu Malaysia;
 - Dusun Seriang Hulu Desa Seriang dengan Wong Panjang Lubok Antu Malaysia;
 - Dusun Mentari Desa Sebindang dengan Ensawang Lubok Antu Malaysia;
 - Dusun Berangan II Desa Janting dengan Kampung Panggang Lobok Antu Malaysia;

Jalan.....

- Jalan Simpang Empat Jhon Desa Badau dengan Kampung Panggang Lubok Antu;
 - Dusun Perumbang Desa Kekurak dengan Ensawang Lubok Antu Malaysia.
- (b) Kecamatan Puring Kencana terdapat 6 (enam) jalur ilegal, yaitu:
- Dusun Jaung Desa Langau dengan Entikah Batu Lintang Malaysia;
 - Dusun Sungai Mawang Desa Sungai Mawang dengan Temiang Batu Lintang Malaysia;
 - Dusun Kantuk Asam Desa Kantuk Asam dengan Kampung Nangasan Lubok Antu Malaysia;
 - Dusun Marakai Panjang Desa Marakai dengan Engkeli Lintang Malaysia;
 - Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu dengan Kampung Temiang Batu Lintang Malaysia;
 - Dusun Langau Desa Langau dengan Entikah Batu Lintang Malaysia.
- (c) Kecamatan Empanang terdapat 1 (satu) jalur ilegal, yaitu :
- (d) Dusun Upak Hulu Desa Kumang Jaya dengan Nangasan Majuma Malaysia.
- (e) Kecamatan Embaloh Hulu, terdapat 1 (satu) jalur ilegal, yaitu:
- (f) Dusun Kelayam Desa Manua Sadap dengan Batu Lintang Kapet Malaysia.
- (g) Kecamatan Batang Lupar terdiri dari 5 (lima) jalur ilegal, yaitu:

Dusun.....

- Dusun Kapar Desa Senunuk dengan Nanga Sumpak Deluk Malaysia;
 - Dusun Keladan Desa Senunuk dengan Nanga Sumpak Deluk Malaysia;
 - Dusun Guntul Desa Senunuk Kec. Batang Lupar dengan Nanga Sumpak Deluk Malaysia;
 - Dusun Limbung Desa Setulang dengan Nanga Menyang Nanga Jambu Malaysia;
 - Dusun Kelawik Desa Mensiau dengan Nanga Punga Malaysia.
- (h) Kecamatan Putusibau Utara, terdiri dari 2 (dua) jalur, yaitu :
- Dusun Nanga Potan Desa Tanjunglasa dengan Kapit Malaysia;
 - Dusun Nanga Hopat Long Leme Desa Datah Diaan dengan Kapit Malaysia;
- (i) Kecamatan Putusibau Selatan;
Dusun Nanga Bungan Desa Bungan Jaya dengan Long Singot Malaysia.
- (3) perbatasan dan pulau terluar
Tidak terdapat pulau terluar, namun terdapat pulau kecil berpenghuni dan tidak berpenghuni sebanyak 218 pulau kecil, terdiri dari 161 pulau kecil berpenghuni dan 57 pulau kecil tidak berpenghuni.
- (4) isu-isu pokok yang terjadi di perbatasan Kalbar - Indonesia dengan Serawak - Malaysia bisa menjadi permasalahan nasional yang sewaktu-waktu dapat merepotkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diantara isu yang ada di perbatasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- (a) darat.....

(a) darat

- penyelundupan barang-barang / kebutuhan bahan pokok dari Malaysia ke Indonesia khususnya di perbatasan yang berdekatan dengan kota-kota antara kedua negara RI dengan Malaysia karena sulitnya mendapat pasokan bahan pokok dari daerahnya;
- ilegal logging, ilegal minning disepanjang garis perbatasan yang dilakukan oleh orang-orang Warga Negara Malaysia;
- tindak pidana lainnya yang dilakukan di wilayah Malaysia yang berbatasan dengan negara Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang warga negara Indonesia;
- pelintas batas ilegal dan TKI yang mencari kerja yang masuk melalui jalan pintas di wilayah perbatasan;
- konflik antar negara karena perbatasan darat tidak jelas (patok-patok yang sudah hilang).

(b) laut

- penyelundupan kayu (illegal logging, BBM dan barang-barang lainnya) dari Indonesia ke negara Malaysia, kebanyakan kayu yang diselundupkan merupakan jenis kayu yang berkelas seperti ulin, kayu hitam, merbau dll).
- illegal fishing, banyak kapal-kapal trowl Malaysia yang mencari ikan sampai ke perairan Indonesia biasa menggunakan modus memasang bendera Indonesia jika memasuki perairan Indonesia untuk mengelabui petugas keamanan.

TKI.....

- TKI ilegal, dengan menggunakan speed kecil/perahu jongkong mengangkut TKI tanpa dilengkapi dokumen yang sah.
- Perompakan di laut terhadap kapal-kapal Indonesia.

(c) kerawanan Tindak Pidana di Perbatasan

- Illegal logging
- Illegal fishing
- Illegal minning
- Trafficking in person
- People smuggling
- Penyelundupan
- Arm smuggling & handak
- Terorisme
- Sea piracy.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi Polda Kalbar yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari Mapolda Kalbar sampai dengan perbatasan dan pulau terluar berpenghuni yang didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Kalbar dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi.....

terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan, terorisme, korupsi dan Narkoba menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

Pelaksanaan tugas Polda Kalbar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan aspek peluang dan tantangan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Polda Kalbar.

1) kekuatan (*strenght*)

- a) Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur terdepan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban kepada masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan, Polda Kalbar mulai tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 Mapolda Polda Kalbar, 1 Polresta dan 13 Polres, 153 Polsek (Polsek : 16 Urban, 118 Rural dan 21 Prarural), 3 Polsek Kawasan serta 9 Polsubsektor;

b) kekuatan.....

- b) kekuatan personel Polda Kalbar Tahun 2024 (Juli), sebanyak 11.631 pers;
- c) dukungan Sarpras Polda Kalbar yang semakin meningkat setiap tahunnya khususnya pemenuhan peralatan operasional seperti; alat transportasi udara (helikopter), transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan bermotor taktis), persenjataan, alat penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapolda Kalbar sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung sebagian besar kegiatan operasional Polri;
- d) komitmen bersama (MoU) Polri (Polda Kalimantan Barat) dengan Polis Diraja Malaysia Kontinjen Serawak dalam rangka merealisasikan komitmen bersama dalam pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*);
- e) personel Polda Kalbar telah membuat dan menandatangani komitmen integritas dan *zero tollerance* terhadap penyimpangan;
- f) kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
- g) meningkatnya penilaian Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) Polda Kalbar dalam 4 tahun terakhir dengan kategori Pagu Sedang, yaitu tahun 2021 dengan nilai 76,77 (peringkat 7), tahun 2022 nilai 77,42 (peringkat 5), tahun 2023 nilai 78,64 (peringkat 1) dan tahun 2024 nilai 79,41 (menunggu pemberitahuan Itwasum Polri). Dengan meningkatkannya nilai AKIP berpotensi tunjangan kinerja Polri akan meningkat.

2) kelemahan.....

- 2) kelemahan (*weakness*)
- a) terdapat 3 Polsek yang belum memiliki Mako, yaitu Polsek Muara Pawan, Benua Kayong (Polres Ketapang) dan Lumar (Polres Bengkayang);
 - b) terdapat 11 Kecamatan belum terbentuk kesatuan baik Polsek ataupun Polsubsektor yaitu Kec. Pontianak Tenggara (Polresta Pontianak), Selakau Timur (Polres Sambas), Kec. Lembah Bawang, Tujuh Belas (Polres Bengkayang), Kec. Banyuke Hulu (Polres Landak), Kec. Pinoh Utara dan Kec. Tanah Pinoh (Polres Melawi), Kec. Singkup, Hulu Sungai dan Kec. Pemahan (Polres Ketapang) serta Kec. Kepulauan Karimata. (Polres Kayong Utara);
 - c) belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri di lapangan;
 - d) panjangnya garis perbatasan wilayah Kalbar - Indonesia dengan Serawak-Malaysia yaitu 966 Km yang memerlukan pengamanan dari Polri, namun Polda Kalbar baru memiliki 5 Polsubsektor Perbatasan dan 4 Pos Pelayanan Kepolisian Perbatasan;
 - e) terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik tersertifikasi sehingga hasil didik di SPN Polda Kalbar yang diharapkan oleh standar pendidikan dan kualifikasi belum memadai. Hal ini dapat dilihat bila di hadapkan dengan permasalahan organisasi maupun pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum yang semakin kompleks, maka masih perlu untuk ditingkatkan dalam pemenuhan kuantitas tenaga pendidik dan hasil didik yang berkualitas;
 - f) personel Polda Kalbar memiliki kesempatan yang sangat terbatas baik di fungsi operasional maupun pembinaan untuk.....

untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun ketrampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi informasi dan bio kimia di bidang kriminalitas yang modern. Hal ini dapat dilihat dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian perkara, personel Polri masih sangat terbatas kemampuan dan pengetahuannya;

- g) kultur budaya organisasi Polri termasuk di Polda Kalbar belum menunjukkan kemajuan yang optimal yang terindikasi dari masih terdapatnya anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, meskipun persentasenya bila dibandingkan dengan jumlah pegawai negeri pada Polri tidak signifikan namun dengan adanya pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;
 - h) produk perencanaan yang disusun oleh Satker jajaran Polda Kalbar belum seluruhnya mengacu pada manajemen risiko dan proses bisnis.
 - i) Almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi belum berbasis MEPE (*Minimum Essential Police Equipment*).
- 3) peluang (*opportunities*)
- a) Polda Kalbar merupakan salah satu Polda penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi ditingkat menjadi Polda tipe A Khusus;
 - b) kebijakan Pemerintah Pusat yang memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan;
 - c) kebijakan.....

- c) kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan *good government*, *clean governance*, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima;
 - d) peningkatan anggaran operasional kepolisian dan tunjangan kinerja;
 - e) adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kalbar;
 - f) adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor handphone para pejabat utama Polda Kalbar dan para Kasatwil;
 - g) semakin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
 - h) adanya atensi pemerintah pusat tentang prioritas perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan.
 - i) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk dapat melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri yang mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.
- 4) ancaman (*threat*)
- a) kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang terjadi diwilayah hukum Polda Kalbar terutama rawan terhadap kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) meliputi:
 - (1) pelanggaran.....

- (1) pelanggaran lintas batas orang dan barang.
 - (2) *trafficking in person*.
 - (3) penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.
 - (4) penyelundupan kendaraan.
 - (5) *illegal logging, illegal mining, illegal trading dan illegal fishing*;
 - (6) pengaruh budaya / adat istiadat.
- b) wilayah Kalimantan Barat yang memiliki pantai sepanjang 1.163 Km yang merupakan corong barat pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian luas juga menimbulkan kerawanan tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses peredaran gelap Narkoba;
- c) potensi kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai. Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat Kepolisian secara berlanjut;
- d) sulitnya masyarakat perbatasan (Kalbar - Malaysia) untuk mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat perbatasan mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan berdampak negatif terhadap wawasan kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga berpotensi menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa;
- e) berkembangnya wilayah perbatasan yang ditandai dengan diresmikannya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar daerah hukum Polres Sambas, PLBN Badau daerah hukum Polres Kapuas Hulu dan Jagoi Babang daerah hukum Polres Bengkayang (menunggu peresmian) serta direncanakan.....

direncanakan berikutnya adalah Ketungau Hulu daerah hukum Polres Sintang;

- f) masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni belum dibangun Pos Pelayanan Kepolisian sehingga rawan terjadinya tindak kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;
- g) adanya perbedaan status sosial dan ekonomi yang mencolok antara masyarakat Kalbar - Indonesia di perbatasan dengan masyarakat negara tetangga Serawak-Malaysia, sehingga memberikan pengaruh psikologis bagi masyarakat perbatasan yang akhirnya timbul kecemburuan sosial dan mendorong masyarakat perbatasan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang dan melanggar hukum;
- h) masalah perkebunan kelapa sawit berpotensi menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang digunakan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah masuk dalam wilayah hutan masyarakat / tanah adat dan ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma.

2. Identifikasi Masalah

Berkembangnya lingkungan strategis yang berdampak pada meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas Polda Kalbar pada tahun 2025 diprediksi akan semakin berat, dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan di Kalbar.

b. proses.....

- b. proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya, perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- c. peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Kalbar masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah, saat ini kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak;
- d. penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses ilegal perlu ditingkatkan Polda Kalbar, mengingat semakin maraknya kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani Polda Kalbar secara profesional, serta Polda Kalbar perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial;
- e. pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi, *transnational crime* dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh Polda Kalbar mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara profesional, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadi antensi pemerintah;
- f. kesejahteraan aparatur Polda Kalbar dan pelayanan kepolisian lainnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas (Lokpri) masih sangat terbatas sehingga memerlukan kajian dan usulan untuk peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja secara bertahap;
- g. penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan mengaktifkan kegiatan Wasrik dan kerja sama dengan pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polda Kalbar yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- h. pengembangan.....

- h. pengembangan aparatur Polda Kalbar yang fokus untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masih belum optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme;
- i. terpenuhinya Sarpras Polda Kalbar dari tingkat Mapolda Kalbar dan kewilayahan khususnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas (Lokpri) sesuai dengan kebutuhan minimal Almatasus dan Alpalkam Polri masih perlu untuk ditingkatkan mengingat Sarpras sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari;
- j. panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupandan rawan terjadi aneksasi pulau/wilayah Kalbar oleh pihak asing masih perlu mendapatkan pengamanan khusus dari Polri.

II. Tujuan dan Sasaran

- 1. Visi dan Misi Polri
 - a. Visi Polri
Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat.
 - b. Misi Polri
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.
- 2. Visi dan Misi Polda Kalbar
 - a. Visi Polda Kalbar
Terwujudnya Kalimantan Barat Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat.
 - b. Misi Polda Kalbar
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

3. Tujuan.....

3. Tujuan Jangka Menengah

a. Nasional

Tujuan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 bidang pertahanan dan keamanan yaitu "Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan". Adapun tema Pembangunan tahun 2025 yaitu: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 3 (tiga) fokus arah kebijakan yang meliputi: SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif), Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas) dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan).

b. Polri

Adapun tema pembangunan Polri Tahun 2025 adalah "*Polri Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dengan tujuan:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

c. Polda Kalbar

Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah "*Polda Kalbar Siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dengan tujuan:

- 1) memelihara.....

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat
- 2) menegakkan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

4. Sasaran Prioritas

a. Nasional

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen dan Penanggulangan Terorisme;
- 2) Penguatan Keamanan Laut dan *Hidro-Oceanografi*;
- 3) Penguatan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal;
- 4) Penguatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- 5) Penguatan Keamanan Insani, Pelindungan WNI dan BHI, Keimigrasian dan Narkoba.

b. Polri

Sasaran Prioritas Polri Tahun 2025 yang terdapat pada Surat Edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama** "Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara Prediktif dan Proaktif";
- 2) **kedua** "Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif Berbasis Digital";

3) ketiga.....

- 3) **ketiga** "Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI)";
- 4) **keempat** "Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional";
- 5) **kelima** "Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE)";
- 6) **keenam** "Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian".

c. Polda Kalbar

Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2025 mengacu kepada Sasaran Prioritas Kapolri, yaitu sebagai berikut:

- 1) **pertama** "Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif";
- 2) **kedua** "Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalbar yang Semakin Inovatif Berbasis Digital";
- 3) **ketiga** "Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI)";
- 4) **keempat** "Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional";
- 5) **kelima** "Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE)";
- 6) **keenam** "Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian".

III. Program.....

III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2025

1. Program Prioritas Nasional

Program Prioritas nasional tahun 2025 dalam rangka supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. stabilitas ekonomi, politik, dan hukum;
- b. memperkuat pertahanan berdaya gentar kawasan dan keamanan nasional;
- c. meningkatkan ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global;

Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga Stabilitas Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan, serta meningkatkan Ketangguhan Diplomasi menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau supporting dari Kementerian/Lembaga terkait.

2. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2025

- a. Sasaran Prioritas I "Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara Prediktif dan Proaktif", terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
 - 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
 - 3) mengoptimalkan kegiatan "Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*)" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
 - 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
 - 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
 - 6) meningkatkan.....

- 6) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "Slum Area";
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025;
- 8) melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;
- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- 10) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
- 11) mendukung kegiatan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
- 12) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melakukan.....

- b) melakukan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya Tindak Pidana Terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya;
(giat3143,progLidikSidik/SP1/SS2/IKUa);
 - c) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;
(giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pembinaan dan operasional kepolisian serta pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;
(giat5067,progDukma/SP1/SS5/IKPe);
- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
(giat3114,3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;
(giat3143,progLidiksidik;giat3128,5076,progHarkamtibmas /SP1/ SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama Igaras (Ideologi garis keras) yang telah mengikuti program.....

program moderasi beragama, dalam penanganan kasus terorisme;

(giat3143,progLidikSidik;giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya;

(giat3143,progLidikSidik;5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

(giat3149,progDukma/SP1/SS5/IKPc);

- f) melaksanakan "edukasi" dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan press release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;

(giat3070,3149,progDukma/SP1/SS5/IKPg);

- g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;

(giat3130,3131,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan "Pemolisian Masyarakat (Community Policing)" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (Cooling System) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; *(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

5) arah.....

- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "Pertumbuhan Ekonomi" serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "Slum Area";
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi "*ketanggapsegeraan*" dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(giat3130,5081,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) memetakan.....

- c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "*Bhabinkamtibmas*" yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan "*pelayanan Kesehatan*" dan "*trauma healling*" pada daerah rawan gempa dan bencana;
(giat3072,progDukma;giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPe);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat berlangsung event nasional/internasional berlangsung;
(giat5079,5080,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan pengamanan event nasional PON XXI tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, Festival Olahraga Nasional (Fornas) di NTB, Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh;
(giat5079,3130,3133,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event internasional meliputi: KTT, ASEAN, Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo, Sail Cendrawasih, Motto GP/WSBK Mandalika 2025, Kejuaraan Dunia Bola Voli 2025, Marathon Bali

2025, Piala Dunia U-20 2025, Pam F-1 H-20 Power Boat Sumut 2025 dan Kejuaraan Dunia Gimnastik 2025;

(giat3130,3133,5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur;

(giat3130,3133,5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

8) arah bijak: melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;

(giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;

(giat5076,5087,5080,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

c) melaksanakan back up pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;

(giat3130,3131,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di Kawasan Obvitnas dan objek tertentu;

(giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; *(giat5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*

9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "stakeholder" terkait;
(*giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/Indonesia di mata internasional;
(*giat3122,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional serta di wilayah perbatasan NKRI;
(*giat3122,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan patrol kapal Polri dan "back up" di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(*giat3134,4342,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan "back up" patrol dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan;
(*giat3135,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2025;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(giat3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi event;
(giat3130,3131,3135,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala intensitas tinggi;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional tahun 2025; *(giat5079,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*

12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

b. Sasaran.....

b. Sasaran Prioritas II "Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif Berbasis Digital", terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TI (Teknologi Informasi);
- 2) meningkatkan profesionalisme Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar/ gratifikasi pada sentra pelayanan publik Polri;
- 3) mengoptimalkan "ketanggapsegeraan" dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TI; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
 - b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat3071,5055/progDukma/SP2/SS1/IKU1);
 - c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan perbatasan;
(giat3133,progHarkamtibmas;3071,5055,progDukma/SP2/SS4/IKP4b);
 - d) melakukan.....

- d) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman website humaspolri.go.id secara berkala;
(giat3149,progDukma/SP2/SS1/IKPg);
- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online;
(giat3128,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
- b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat3072,progDukma/SP2/SS5/IKP5e);
- c) mengoptimalkan proses integrasi Binmas Online System (BOS) V2 dengan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespons aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit-belit; *(giat4340,progDukma/SP2/SS5/IKP5g);*
- b) mengoptimalkan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
- c) meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu;
(giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);

c. Sasaran.....

- c. Sasaran Prioritas III "Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation (SCI)*" terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 3) mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
 - 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(*giat3134,4342,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*giat3143,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
 - c) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(*giat.....*

(giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/ SP3/SS2/IKUb);

- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan;

(giat3142,3145,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

- e) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Indonesia;

(giat4342,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);

- f) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;

(giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);

- g) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui "Restorative Justice" yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan; *(giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);*

- h) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber;

(giat3151,progLidikSidik;giat5076,pogHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);

- i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;

(giat3130,progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);

- j) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;

(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

k) memberikan.....

- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.
(giat3140,3141,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- 2) arah bijak: melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa);
- b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik Labfor dan Inafis dalam pengungkapan tindak pidana;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa);
- 3) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) memberikan SP2HP2 kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
(giat3137,5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- 4) arah.....

- 4) arah bijak: mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan integrasi seluruh "*database*" pelayanan dan penyajian informasi kriminal dari seluruh Satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
(*giat5084,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
 - b) melanjutkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*); (*giat5084,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);
- d. Sasaran Prioritas IV "Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - 3) meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan serta pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
 - 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
 - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja;
- Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:
- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri ke depan;
(giat5068,5069,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/ instruktur dan pengasuh;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi "Dalmas dan Negosiator" yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat dan event nasional/internasional tahun 2025;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "Menjunjung Tinggi HAM" dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat dan menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
(giat3100,progProfesionalismeSDMpolri;giat5076,3130,5087,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb);
- e) meningkatkan kapasitas SDM Polri di bidang Siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3141,3151,progLidik Sidik/SP4/SS3/IKPb);
- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
(giat.....

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat4341,progModernisasi AlmatSusSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb);

- h) meningkatkan kapasitas personel kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polri dan keluarganya;

(giat3072,progDukma;giat3100progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);

- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP di lingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mencegah terjadinya korupsi;

(giat3068,progDukma/SP4/SS3/IKPb);

- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE;

(giat5052,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- b) meningkatkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital;

(giat5053,progDukma SP4/SS5/IKPe);

- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis TI (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward);

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

b) melanjutkan.....

- b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2025 sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;
(*giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 sebanyak 19.381 orang terdiri dari: Lemhanas 60 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 200 orang, S-2 KIK-UI 20 Orang, S-3 STIK-PTIK 20 orang, S-2 STIK-PTIK 30 orang, S-1 STIK-PTIK 200 orang, S-2 MSDM-UI 20 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 2.500 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 300 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 400 orang, PKN I 30 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Kermadik Gassus 300 Orang, SPPK 70 Orang, Dikbangspers 12.986 orang;
(*giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- f) melaksanakan.....

- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat3104,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - h) menyiapkan dan mengelola personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap;
(giat3108,ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKPa);
- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan MoU kermadiklat Dagri dan Lugri;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3120,3122,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);
 - c) menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholder, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) di tingkat Polda;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan.....

- a) melanjutkan penyempurnaan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "sistem reward and punishment" serta sistem reward terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*";
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP guna menerapkan Merit System dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,3108,progProfesionalismeSDMPolri;giat5076,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota Polri dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
 - b) mengoptimalkan.....

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polri yang gugur/tewas saat tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;
(giat3072,progDukma;giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS5/IKPe);
- c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan user friendly termasuk berkaitan dengan Asabri;
(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);
- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat3072,5062,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
- e. Sasaran Prioritas V "Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE)" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
 - 2) mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
 - 3) pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk diwilayah perbatasan, terjauh dan terluar di indonesia;
 - 4) melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
 - 5) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus Scientific Criminal Investigation (SCI);
 - 6) melanjutkan.....

6) melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara online;

(giat3071,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);

b) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;

(giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB prototype dan gedung Satpas prototype;

(giat3071,progDukma;giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

d) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia Safety Driving Center;

(giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

e) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC;

(giat.....

(giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan ETL E guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya;

(giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- g) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri;

(giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- h) melaksanakan Litbang pembuatan *prototype* peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;

(giat3071,5067,progDukma;prog3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- i) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana;

(giat5055,progDukma;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE);

(giat5060,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- k) pemenuhan peralatan penanganan awal bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat;

(giat3084,5060,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- l) pemenuhan kendaraan Listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbarukan;

(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

m) pemenuhan.....

- m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan event nasional/internasional tahun 2025, pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata;
(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) arah bijak: mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(giat5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- b) mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;
(giat4341,progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk wilayah perbatasan, terjauh dan terluar Indonesia;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan usulan pembangunan fasilitas Kantor Pusat Polri di IKN dan pembangunan Mako Polres/Polrestabes kawasan IKN;
(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- b) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri.....

Polri di seluruh wilayah termasuk di wilayah perbatasan, terjauh dan terluar Indonesia;

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 /IKPb);

- c) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung "*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*";

(giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP 5/SS4/IKPb);

- 4) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensic di kewilayahan secara bertahap; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensic beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana;

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/ IKPb);

- 5) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus Scientific Criminal Investigation (SCI); untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensic dengan teknologi terkini;

(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 /IKPb);

- b) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana indentifikasi kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan.....

pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik kepolisian;

(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 /IKPb);

- 6) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem teknologi informatika kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap;

(giat3071,5055,ProgDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;

(giat5055,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);

- c) mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika kepolisian berdasarkan hasil penelitian;

(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri;giat5067, prog Dukma/SP5/SS4/IKPb);

- f. Sasaran Prioritas VI "Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;

- 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;

- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan internal Polri;

4) meningkatkan.....

- 4) meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
 - b) mendorong.....

- b) mendorong pelayanan publik secara online yang bersih transparan dan akuntabel berbasis Medsos/Whatsapp;
(giat3091,3149,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal;
(giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "*operasi bersih*" terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi Whistle Blower System (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan.....

- b) melanjutkan sosialisasi "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017" tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 4) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri;
(giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polri dalam e-Jakstra dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; *(giat5051,progDukma/SP6/SS5/IKPf);*
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - d) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap;
(giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; *(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);*
 - c) melaksanakan perubahan peraturan kepolisian tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor; *(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);*
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih predikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta/Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun.....

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;

(giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd);

c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); *(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);*

d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);

3. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2025

a. Sasaran Prioritas I "Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Kalimantan Barat secara Prediktif dan Proaktif", terdiri dari 12 (dua belas) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- 2) menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
- 3) mengoptimalkan kegiatan "*Pemolisian Masyarakat (Community Policing)*" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- 5) meningkatkan.....

- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan;
- 6) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "Slum Area";
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025;
- 8) melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan;
- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- 10) melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;
- 11) mendukung kegiatan pengamanan event nasional/internasional tahun 2025;
- 12) meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap.....

setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;

(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- b) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa/kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas;

(giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- c) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pembinaan dan operasional kepolisian serta pengukuran Indeks Kamtibmas Polri;

(giat5067,progDukma/SP1/SS5/IKPe);

- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;

(giat3114,3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme;

(giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- c) meningkatkan pelibatan peran *civil society* dan tokoh agama Igaras (Ideologi garis keras) yang telah mengikuti program moderasi beragama, dalam penanganan kasus terorisme;

(giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

d) melaksanakan.....

- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks nabi terorisme beserta keluarganya;
(5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
(giat3149,progDukma/SP1/SS5/IKPc);
 - f) melaksanakan "edukas" dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan press release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri;
(giat3070,3149,progDukma/SP1/SS5/IKPg);
 - g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata;
(giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan "*Pemolisian Masyarakat (Community Policing)*" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) peningkatan.....

- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 4) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; *(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan.....

- b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; *(giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "*Pertumbuhan Ekonomi*" serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; *(giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "*Slum Area*"; untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi "*ketanggapsegeraan*" dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi; *(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; *(giat3130,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "*Bhabinkamtibmas*" yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana; *(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan "*pelayanan Kesehatan*" dan "*trauma healling*" pada daerah rawan gempa dan bencana; *(giat3072,progDukma/SP1/ SS3/IKPa/SS5/IKPe);*

7) arah.....

- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara serta event nasional/internasional tahun 2025; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat berlangsung event nasional/internasional berlangsung; *(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - b) melaksanakan pengamanan event nasional Pameran Dagang Nasional, Festival Budaya Nasional/Nusantara, Cap Go Meh; *(giat5079,3130,3133,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - c) membantu pelaksanaan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur; *(giat3130,3133,5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- 8) arah bijak: melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan; untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik; *(giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
 - b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan.....

- keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(*giat5076,5087,5080,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- c) melaksanakan back up pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3130,3131,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di Kawasan Obvitnas dan objek tertentu;
(*giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; (*giat5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "stakeholder" terkait;
(*giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Kalbar guna mendukung kegiatan keamanan laut;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
meningkatkan kegiatan patrol kapal Polri dan "back up" di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai Prov. Kalbar untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(*giat3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa*);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan pengamanan event nasional/ internasional tahun 2025;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan.....

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/ internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(giat3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi event;
(giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan pengamanan event nasional tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala intensitas tinggi;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional tahun 2025; *(giat5079,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);*
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 12, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b. Sasaran Prioritas II "Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalbar yang semakin Inovatif Berbasis Digital", terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan.....

- 1) mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar yang berbasis TI (Teknologi Informasi);
- 2) meningkatkan profesionalisme Polda Kalbar dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar/gratifikasi pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar;
- 3) mengoptimalkan "*ketanggapsegeraan*" dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar yang berbasis TI;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
 - b) mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
 - c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan perbatasan Kalbar;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4b);
 - d) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/laman website kalbar.polri.go.id secara berkala;
(giat3149,progDukma/SP2/SS1/IKPg);

2) arah.....

- 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme Polda Kalbar dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Kalbar; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online;
(*giat3128,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa*);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes Polda Kalbar;
(*giat3072,progDukma/SP2/SS5/IKP5e*);
 - c) mengoptimalkan proses integrasi Binmas Online System (BOS) V2 dengan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d*);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(*giat5081,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu;
(*giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- c. Sasaran Prioritas III "Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI)" terdiri dari 4 (empat) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - 2) melaksanakan.....

- 2) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik di era digital dan kemajuan teknologi;
- 3) mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum;
- 4) mengoptimalkan peran pusat data dan informasi kriminal nasional.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 10 (sepuluh) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Kalbar;
(giat3134,4342,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - b) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (*pencegahan dan asset recovery*), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(giat3140,3142,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan;
(giat3142,3145,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - d) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Kalbar;
(giat4342,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
 - e) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam
rangka.....

rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;

(*giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb*);

f) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui "Restorative Justice" yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan; (*giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);

g) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber;

(*giat3151,progLidikSidik;giat5076,pogHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);

h) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;

(*giat3130,progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);

i) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;

(*giat3142,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);

j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.

(*giat3140,3141,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);

2) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) memberikan SP2HP2 kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;

(*giat3137,5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

b) mengoptimalkan.....

- b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- d. Sasaran Prioritas IV "Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalbar yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 2) mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - 3) meningkatkan kualitas SDM Polda Kalbar yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
 - 4) melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan serta pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
 - 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
 - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Kalbar melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polda Kalbar yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 7 (tujuh) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melaksanakan.....

- a) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/ instruktur dan pengasuh;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- b) meningkatkan pelaksanaan latihan dan Harkatpuan fungsi "*Dalmas dan Negosiator*" yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat dan event nasional/internasional tahun 2025;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- c) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "*Menjunjung Tinggi HAM*" dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat dan menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
(giat3100,progProfesionalismeSDMpolri;giat5076,3130,5087,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb);
- d) meningkatkan kapasitas SDM Polda Kalbar di bidang Siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3141,3151,progLidikSidik/SP4/SS3/IKPb);
- e) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polairud serta Dirlantas Polda Kalbar dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
- f) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat4341,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb);
- g) meningkatkan kapasitas personel kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polda Kalbar dan keluarganya;
(giat.....

*(giat3072,progDukma;giat3100progProfesionalismeSDMP
olri/SP4/SS3/IKPb);*

- 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Polda Kalbar yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polda Kalbar antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE;
(giat5052,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
 - b) meningkatkan pelayanan publik Polda Kalbar yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital;
(giat5053,progDukma SP4/SS5/IKPe);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polda Kalbar yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis TI (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polda Kalbar sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan.....

mengalokasikan rekrutmen PNS Polda Kalbar yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polda Kalbar yang berkualitas berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (*rekrutmen*) tahun 2025 sebanyak 5.623 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;

(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polda Kalbar untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2025 terdiri dari: Lemhanas 1 orang, Sespimti 3 orang, Sespimmen 6 orang, S-1 STIK-PTIK 5 orang, Sespimma 5 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 72 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 37 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 6 orang, UDKP/I PNS 6 orang, PKN I 1 orang, PKN II 2 orang, PKA 3 orang, PKP 3 orang, SPPK 2 Orang, Dikbangspers 1 giat;

(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

(giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholder, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) di tingkat Polda;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

5) arah.....

- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan penyempurnaan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem reward terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "*program manajemen talenta*";
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100,3108,progProfesionalismeSDMPolri;giat5076,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota Polri dan keluarganya serta pelayanan administrasi.....

administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;

(giat3072,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polri yang gugur/tewas saat tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;

(giat3072,progDukma;giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS5/IKPe);

- c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan Asabri;

(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);

- d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);

(giat3072,5062,progDukma/SP4/SS5/IKPe);

- e. Sasaran Prioritas V "Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE)" terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
- 2) pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk di wilayah perbatasan, terjauh dan terluar di Kalbar;
- 3) melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah.....

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 8 (delapan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara online;
(giat3071,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsus Sarpras Polri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB prototype dan gedung Satpas prototype;
(giat3071,progDukma;giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - c) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia Safety Driving Center;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - d) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5062,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - e) melanjutkan pembangunan/pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat3084/SP5/SS4/IKPb);
 - f) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri;
(giat.....

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 / IKPb);

g) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE);

(giat5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4 /IKPb);

h) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata;

(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

2) arah bijak: pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh Kalbar; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung "*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*";

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

3) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem teknologi informatika kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap;

(giat3071,ProgDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);

f. Sasaran Prioritas VI "Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian" terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1) melanjutkan.....

- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
- 2) melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan internal Polri;
- 4) meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polda Kalbar yang transparan dan akuntabel;
- 5) melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih berpredikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);

2) arah.....

2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- b) mendorong pelayanan publik secara online yang bersih transparan dan akuntabel berbasis Medsos/Whatsapp; (*giat3091,3149,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli; (*giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespimma, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli; (*giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);
- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "*operasi bersih*" terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (*giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg*);

3) arah.....

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System* (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(*giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);
 - b) melanjutkan sosialisasi "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017" tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);
- 4) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polda Kalbar;
(*giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPf*);
 - b) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(*giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf*);
 - c) melaksanakan.....

- c) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap;
(giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; *(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);*
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih predikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; *(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);*
- b) melanjutkan.....

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
(*giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd*);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (*giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/ Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(*giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);.

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025

1. Program dan Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) pelayanan administrasi keuangan Polda Kalbar;
- b) penerangan masyarakat;

c) penyelenggaraan.....

- c) penyelenggaraan teknologi informasi;
 - d) pelayanan kesehatan Polda Kalbar;
 - e) dukungan pelayanan internal perkantoran Polda Kalbar;
 - f) pengelolaan multimedia;
 - g) penyusunan kebijakan strategi Polda Kalbar;
 - h) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polda Kalbar;
 - i) reformasi birokrasi Polda Kalbar;
 - j) manajemen anggaran;
 - k) teknologi komunikasi;
 - l) pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - m) pertanggungjawaban profesi;
 - n) penyelenggaraan pengamanan internal Polda Kalbar;
 - o) penegakan tata tertib dan disiplin Polda Kalbar;
 - p) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
 - q) pemberian bantuan dan nasihat hukum;
 - r) kerja sama dan penyuluhan hukum;
 - s) penyusunan, dokumentasi dan informasi hukum;
 - t) monitoring dan evaluasi.
- b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polda Kalbar
- 1) Tujuan:
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polda Kalbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.
 - 2) Kegiatan:
 - a) pengembangan peralatan Polda Kalbar;
 - b) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;
 - c) pengkajian dan strategi Sarpras;
 - d) pengembangan perbekalan umum;
 - e) pengembangan fasilitas dan konstruksi Polda Kalbar;
 - f) pengadaan Polda Kalbar;
- c. Program.....

c. Program Profesionalisme SDM Polda Kalbar

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polda Kalbar yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas di era digital dan kemajuan teknologi, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis profesionalisme SDM Polda Kalbar;
- b) sekolah staf dan pimpinan pertama Polri;
- c) pendidikan tinggi ilmu kepolisian;
- d) sekolah staf dan pimpinan menengah Polri;
- e) penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri;
- f) pengkajian pengembangan pendidikan dan latihan Polri;
- g) pembinaan pendidikan dan latihan Polri;
- h) penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri;
- i) sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri;
- j) pengkajian dan strategi SDM Polda Kalbar;
- k) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polda Kalbar;
- l) pengendalian pegawai Polda Kalbar;
- m) pembinaan karier personel Polda Kalbar;
- n) pelayanan psikologi anggota Polda Kalbar.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional Polda Kalbar dan informasi kepolisian serta serta melaksanakan kerja sama lintas sektoral yang fokus pada.....

pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi/dini, *preemptif* dan *preventif*.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) kerja sama keamanan dan ketertiban luar negeri;
- c) analisis keamanan;
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- f) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- g) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- h) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus;
- i) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
- j) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- k) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
- l) penyelenggaraan Kepolisian Perairan;
- m) pembinaan potensi keamanan;
- n) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
- o) pengkajian dan strategi operasi Kepolisian;
- p) pembinaan operasi Kepolisian;
- q) pengendalian operasi Kepolisian;
- r) pelacakan dan penangkaln keamanan dan ketertiban;
- s) penanggulangan keamanan dalam negeri;

e. Program.....

e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penyelenggaraan laboratorium forensik;
- d) penindakan tindak pidana umum;
- e) penindakan tindak pidana terorisme;
- f) penindakan tindak pidana Narkoba;
- g) penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
- h) penindakan tindak pidana korupsi;
- i) penindakan tindak pidana siber;
- j) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- k) penindakan tindak pidana tertentu;
- l) penyelenggaraan informasi kriminal nasional;
- m) koordinasi dan pengawasan PPNS;
- n) pengawasan penyidikan;
- o) penindakan tindak pidana perairan;
- p) penindakan tindak pidana lalu lintas.

2. **Pagu Indikatif Polda Kalbar Tahun Anggaran 2025**

- a. alokasi Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025 sebesar Rp. **1.349.349.166,-** (*satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*). Adapun rincian pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025 sebagai berikut:

1) rincian.....

- 1) rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2025 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Pegawai : Rp. 880.240.606.000,-;
 - b) Belanja Barang : Rp. 463.934.898.000,-
 - c) Belanja Modal : Rp. 5.173.662.000,-
 - 2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2025 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni : Rp. 1.234.944.302.000,-
 - b) PNBPNP : Rp. 46.404.864.000,-
 - c) BLU : Rp. 68.000.000.000,-
 - 3) rincian Pagu Indikatif T.A. 2025 per Program sebagai berikut:
 - a) Profesionalisme SDM Polri Rp. 31.574.153.000,-;
 - b) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 106.150.609.000,-;
 - c) Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 145.363.445.000,-;
 - d) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 338.655.340.000,-;
 - e) Dukungan Manajemen Rp. 727.605.619.000,-.
- b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2025
- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan Intake Polda Kalbar tahun 2024, namun Pagu indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 - 2) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan *werving* Diktuk, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
 - 3) mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat, serta untuk mendukung tercapainya prioritas Polda Kalbar tahun 2025;
 - 4) mendukung.....

- 4) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejala/konflik sosial, penanganan flash point, terorisme, penyebaran berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, Almatsus Polda Kalbar, pemenuhan fasilitas Polda Kalbar, fasilitas kantor Satker baru, pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan negara bagi personel Polri di Polda Kalbar dan jajaran;
- 5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polda Kalbar baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin promoter dan presisi;
- 6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- 7) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair jajaran Polda Kalbar;
- 8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah perbatasan NKRI;
- 9) melaksanakan penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polda Kalbar serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri di Polda Kalbar;
- 10) melaksanakan 4 (empat) arah kebijakan utama "*Presisi*" mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri (*Quick Wins Presisi*) yang terdiri dari:
 - a) Transformasi Organisasi;
 - b) Transformasi Operasional;
 - c) Transformasi Pelayanan Publik;
 - d) Transformasi Pengawasan.

11) melaksanakan.....

- 11) melaksanakan 8 Program "*Quick Wins Presisi*" meliputi:
- a) Membangun Budaya Integritas Organisasi;
 - b) Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital;
 - c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul;
 - d) Menciptakan Suasana Kondusif di Masyarakat (*Cooling System*);
 - e) Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas;
 - f) Mengoptimalkan Penegakkan Hukum;
 - g) Meningkatkan Pelayanan Publik;
 - h) Mengoptimalkan Pengawasan.

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat T.A. 2025 disusun sebagai bahan masukan/pedoman Satker jajaran Polda Kalbar dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembinaan untuk melayani masyarakat di bidang Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum T.A. 2025.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
PIPI RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT**



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLDA KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2025
(REVISI)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2025	
1	2	3	4	5
	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel	Indeks Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kalbar	4.17	IKU bersifat <i>outcome</i>
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	Indeks Harkamtibmas	3,78	IKU bersifat <i>outcome</i>
2.	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	Indeks Gakkum Polda Kalbar	4,06	IKU bersifat <i>outcome</i>
3.	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polda Kalbar yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Menyeluruh	a. Indeks Profesionalitas SDM Polda Kalbar	8,22 (2,82)	Nomenklatur selaras dengan Grand Strategy Polri
		b. Indeks pembangunan dan Pengembangan Kapasitas SDM Polda Kalbar	87 (3,76)	Skor merupakan rate capaian kinerja IKU/IKP pada peta strategi Lemdiklat Polri Tahun 2025-2029
4.	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	a. Indeks SPBE	2,9	Penilaian mandiri
		b. Tingkat pemenuhan Minimum Essential Police Equipment (MEPE)	42,03 (1,70)	MEPE senjata, alkom, kendaraan operasional hingga peralatan khusus untuk satuan tertentu
		c. Indeks kualitas Data	4	IKU bersifat <i>outcome</i>
5.	Tata Kelola yang Bersih, Transparan	a. Nilai SAKIP	78,85 (3,69)	IKP tetap, target naik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2025	
1	2	3	4	5
	dan Akuntabel	b. Indeks Reformasi Birokrasi	93,89 (4,45)	IKU bersifat <i>outcome</i>
		c. Indeks Internalisasi Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Polda Kalbar	96 (4,6)	IKU bersifat <i>outcome</i>
		d. Nilai Kinerja Anggaran	96 (4,17)	IKU bersifat <i>outcome</i>
		e. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polda Kalbar	86 (4,13)	Diukur melalui survei kepada publik
		f. Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Kalbar	100 (5)	

Ditetapkan di: Pontianak

pada tanggal : 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
 PIPIT RISMAN TO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025**

REKAP 1: K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. **KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. **VISI** : Terwujudnya Kalimantan Barat Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat
3. **MISI** : Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat
4. **PRIORITAS NASIONAL**
5. **SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L**

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif		338.655.340.000,-
01.01	Indeks Harkamtibmas	72 (2,6)	
02	Penegakkan hukum secara adil		106.150.609.000,-
02.01	Indeks Gakkum	91 (3,5)	
03	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polda Kalbar yang adaptif, kompeten dan berintegritas secara terpadu dan optimal		31.574.153.000,-
03.01	Indeks efektivitas pengelolaan SDM Polda Kalbar	91,54 (3,56)	
03.02	Indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polda Kalbar	87,04 (3,35)	
04	Infrastruktur strategis Kepolisian yang berdaya guna dan modern		145.363.445.000,-
04.01	Indeks SPBE	2	
04.02	Tingkat pemenuhan Minimum Essensial Police Wquipment (MEPE)	6,38%	
04.03	Indeks kualitas data	4	
05	Tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel		727.605.619.000,-

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/353/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
05.01	Nilai SAKIP	78,85	
05.02	Indeks Reformasi Birokrasi	93,89	
05.03	Tingkat internalisasi budaya integritas kejujuran dan kehormatan Polri	95	
05.04	Nilai Kinerja Anggaran	87%	
05.05	Tingkat persepsi publik terhadap reputasi Polri atas masalah hukum yang dihadapi	2	
Total			1.349.349.166.000,-

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIPIIT RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
060.BD	Program Profesionalisme SDMPolri	31.574.153	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.574.153
060.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	106.150.609	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106.150.609
060.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	145.363.445	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145.363.445
060.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	338.655.340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.655.340
060.WA	Program Dukungan Manajemen	727.605.619	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727.605.619
Total		1.349.349.166	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.322.726.184

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIBIT RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 03 - Profesionalisme SDM
3. PROGRAM : Program Profesionalisme SDM Polri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	31.574.153,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	31.574.153,0
Total		31.574.153,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional		31.574.153,0
01.01	terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional	91,54	
Total			31.574.153,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	SDM Polri yang Kompeten	31.574.153,0
01.01	Persentase SDM Polri yang memenuhi kompetensi minimal	
Total		31.574.153,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri	30.603.353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.603.353,0
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri	487.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487.800,0
3108	Pembinaan Karier Personel Polri	305.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305.000,0
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri	178.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178.000,0
Total		31.574.153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.574.153,0

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIBT RISMANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
 TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 02 - Penegakkan hukum secara berkeadilan
 3. PROGRAM : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
 4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	106,150,609,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	106,150,609,0
Total		106,150,609,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi	90.8	106.150.609,0
01.01	Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional.	82,27	
01.02	Persentase pengungkapan tindak pidana transnasional.	82.44	
01.03	Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara,	81.06	
01.04	Persentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi.	50	
Total			106.150.609,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	layanan penegakkan hukum oleh Polri	106.150.609,0
01.01	Indeks Penegakkan hukum Polri	
Total		106.150.609,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	43.188.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43.188.136,0
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	250,165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,165,0
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik	124,317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,317,0
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum	34,439,412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,439,412,0
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba	12,375,957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,375,957,0
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	660,907,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,907,0
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi	8,628,195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,628,195,0
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber	951,986,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,986,0
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan	2,678,627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,678,627,0
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas	991,491,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	991,491,0
5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	584,812,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	584,812,0
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	1,101,790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,101,790,0
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS	109,600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,600,0
5086	Pengawasan Penyidikan	65,214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,214,0
Total		106,150,609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,150,609,0

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIPT RISMANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA
K/L)TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Modernisasi Teknologi
3. PROGRAM : Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	145,363,445,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	145,363,445,0
Total		145,363,445,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal		145,363,445,0
01.01	persentase pemanfaatn Almatsus dan Sarpras	18,80	
Total			145,363,445,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Almatsus dan Sarpras	145,363,445,0
01.01	persentase pemebuhan Almatsus dan Sarpras	
Total		145,363,445,0

7. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3084	Pengembangan Peralatan Polri	2,173,662,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,173,662,0
5059	Dukungan Manajemendan Teknik Sarpras	56,814,967,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,814,967,0
5061	Pengembangan Perbekalan Umum	0,0	69,153,034,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,153,034,0
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri	0,0	0,0	17,221,782	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,221,782
Total		58.988.629,0	69,153,034,0	17,221,782	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,363,445,0

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
 PIRI RISMANTO, S.I.K., M.H.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA
K/L)TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
3. PROGRAM : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
02	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	338,655,340,0
02.04	Pembangunan Wilayah Kalimantan	338,655,340,0
Total		338,655,340,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		338.655.340,0
01.01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan		
Total			338.655.340,0

6. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	338.655.340,0
01.01	Indeks Harkamtibmas	
Total		338.655.340,0

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/353/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban	725,808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725.808,0
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri	344,514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344.514,0
Total		338,655,340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,655,340,0

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIRI RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Sistem pengawasan yang akuntabel, Bersih Terbuka, dan Melayani
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	727,605,619,0
07.05	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	727,605,619,0
	Total	727,605,619,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan		727.605.619,0
01.01	persentase pemenuhan layanan internal yang berkualitas		
	Total		727.605.619,0

LAMPIRAN "C" KEPUTUSAN KAPOLDA KALBAR
NOMOR : KEP/353/IX/2025
TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2025

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum	392,652,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,652,0
4339	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri	340,601,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,601,0
5051	Penyusunan Kebijakan Polri	42,435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,435,0
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri	51,640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,640,0
5053	Reformasi Birokrasi Polri	835,909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	835,909,0
5054	Manajemen Anggaran	617,293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	617,293,0
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	48,500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,500,0
Total		727,605,619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	727,605,619,0

Pontianak, 3 September 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT



PIPIIT RISMANTO, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI